



2024

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PEKANBARU**

**BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru disusun sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2023, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran RENSTRA tahun 2023 - 2026.

Hasil pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKJIP Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024.

Pekanbaru, Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKANBARU,

ZULHELMI ARIFIN, S.STP, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimpelentasikan dalam manajemen pemerintah. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru terus berupaya menyelenggarakan tugas fungsi dengan berinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru 2023 – 2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran pada masing-masing misi berdasarkan capaian pada tahun 2024.

Akhirnya, Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru ini.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi.....iii

Daftar Tabel iv

Ringkasan Eksekutif..... v

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang.....1

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah3

1.3. Landasan Hukum 8

1.4. Isu Strategis10

1.5. Sistematika Penyusunan.....11

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....12

2.1 Rencana Strategis.....12

2.1.1 Tujuan dan Sasaran..... 13

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan..... 15

2.1.3 Program, Kegiatan dan Pendanaan 16

2.2 Rencana Kerja.....40

2.3 Perjanjian Kinerja41

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA43

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja44

3.1.1 Pengukuran Kinerja 44

3.1.2 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran45

3.2 Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2024.....54

3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Renstra 55

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Solusi Yang
Telah Dilakukan.....56

3.5 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....57

3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya58

3.7 Realisasi Anggaran.....67

BAB IV PENUTUP..... 69

Lampiran..... 71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru 14

Tabel 2.2 Sasaran/Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah 2023 -2026 14

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 17

Tabel 2.4 Anggaran Sekretariat Daerah Per-Kegiatan Tahun 2024 Terhadap Renstra ... 29

Tabel 2.5 Anggaran Sekretariat Daerah Per-bagian Tahun 2024..... 39

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Per-Program di Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024..... 42

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 berdasarkan RENSTRA 2023 – 2026 44

Tabel 3.2 Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru Tahun 2023 – 2026 46

Tabel 3.3 Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru 49

Tabel 3.4 Hasil Capaian Penilaian SAKIP Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru 50

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 Menurut Sasaran 54

Tabel 3.6 Capaian RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RENSTRA55

Tabel 3.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Pertama : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 58

Tabel 3.8 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Kedua : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah63

Tabel 3.9 Rincian Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru T.A 2024 Berdasarkan Jenis Belanja.....67

Tabel 3.10 Alokasi Anggaran Belanja Langsung per-Bagian Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru T.A 2024.....68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekanbaru, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kedudukan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, dan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 166 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru mempunyai tugas membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penyusunan dan perumusan kebijakan serta pengkoordinasian Perangkat Daerah meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan tugas pembantuan lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, keorganisasian dan ketatalaksanaan serta teknik administrasi berdasarkan potensi yang dimiliki Kota Pekanbaru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya;

- b. pengkajian, penelaahan dan perumusan peraturan perundang- undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, keorganisasian dan ketatalaksanaan serta teknik administrasi.;
- c. penjabaran instruksi/perintah atasan, petunjuk pelaksanaan serta masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan mempelajari, memahami serta disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- d. pendistribusian tugas kepada para Asisten, para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru maupun para Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai tugas dan kewenangannya;
- e. pengkoordinasian perumusan kebijakan pembangunan, pengelolaan anggaran dan pengendaliannya untuk kelancaran serta tertib administrasi pelaksanaannya;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan administrasi dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketatalaksanaan, keorganisasian, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana;
- g. pengkoordinasian pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- h. perumusan sasaran pelaksanaan operasional program dan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, keorganisasian dan ketatalaksanaan serta administrasi dengan memadukan program kerja pemerintah dan disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga tepat mutu, kualitas dan sasaran;

- i.* pembinaan pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketatalaksanaan, keorganisasian serta pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana melalui petunjuk teknis, pengarahan, ceramah, pelatihan dan penyuluhan guna meningkatkan mutu, keterampilan dan tertib administrasi;
- j.* pengkoordinasian pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- k.* pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka pengendalian melalui rapat teknis, permintaan data laporan, pemantauan lapangan, sehingga dapat diperoleh kebenaran dan perkembangannya;
- l.* penganalisaan data maupun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari perangkat daerah pada semua bidang dengan mempelajari, memahami dan meneliti kembali sehingga diperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- m.* pengendalian semua jenis kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui rapat teknis, permintaan data maupun pelaporan kegiatan secara periodik maupun insidental, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terkendali sesuai program dan ketentuan yang berlaku;
- n.* pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keorganisasian kepada Walikota sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o.* perumusan kebijakan teknis penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Daerah dalam penyelenggaraan kewenangannya baik urusan wajib, urusan pilihan, tugas

pembantuan dan dekonsentrasi yang diberikan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru;

- p. pemberian nilai pelaksanaan pekerjaan terhadap para Staf Ahli, Asisten, Kepala Dinas dan Badan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Camat dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui pengisian maupun pencatatan pada Sasaran Kerja Pegawai dalam upaya peningkatan prestasi kerja dan disiplin pegawai;
- q. penyampaian saran pertimbangan dan/atau telaahan staf kepada Walikota sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan ketentuan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut dan sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru serta sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru dibantu oleh :

1. Asisten Tata Pemerintahan, membawahi:

- a. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan.
 - 2. Sub Bagian Otonomi Daerah.
 - 3. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan.
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Bina Mental Spiritual.
 - 2. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
 - 3. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial

c. Bagian Hukum, membawahi :

1. Sub Bagian Perundang-Undangan.
2. Sub Bagian Bantuan Hukum.
3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

c. Bagian Kerjasama, membawahi :

1. Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri.
2. Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri.
3. Sub Bagian Evaluasi Kerjasama.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :

a. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

1. Sub Bagian Pembinaan BUMD Dan BLUD.
2. Sub Bagian Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian.
3. Sub Bagian Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.

b. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :

1. Sub Bagian Fasilitasi Penyusunan Program
2. Sub Bagian Pengendalian Program
3. Sub Bagian Evaluasi Pelaporan

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :

1. Sub Bagian Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa.
2. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
3. Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa.

d. Bagian Sumber Daya Alam, membawahi :

1. Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan.
2. Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan Dan Lingkungan Hidup.
3. Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi Dan Air.

3. Asisten Administrasi Umum, membawahi :

- a. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Pelaporan
- b. Bagian Umum, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Rumah Tangga
 - 2. Sub Bagian Perlengkapan.
 - 3. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian.
- b. Bagian Organisasi, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
 - 2. Sub Bagian Kinerja Dan Reformasi Birokrasi.
 - 3. Sub Bagian Pelayanan Publik Dan Tata Laksana.
- c. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Protokol.
 - 2. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan.
 - 3. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

1.3. Landasan Hukum

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 ini adalah :

1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023 – 2026.
13. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 194 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru
14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 149 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru

1.4 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi, dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah belum optimal
2. Perkembangan iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya
3. Belum optimalnya penatausahaan keuangan dan pengelolaan asset milik daerah di lingkup Sekretariat Daerah;
4. Adanya tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien
5. Belum optimalnya pemanfaatan TI dan Komunikasi;
6. Belum optimalnya kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan lembaga dan dengan pihak swasta;
7. Masih kecilnya pendapatan daerah melalui BUMD dan terdapat beberapa BUMD yang masih disubsidi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru;
8. Belum optimalnya pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
9. Belum optimalnya pembangunan ekonomi yang terintegrasi;

10. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
11. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan
12. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah yang sering berubah-ubah;

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- BAB I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, penjelasan umum Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, landasan hukum penyusunan LKjIP serta apa yang menjadi isu strategis.
- BAB II - Perencanaan Kinerja, menjelaskan muatan rencana strategis Sekretariat Kota Pekanbaru untuk periode 2023 - 2026, Indikator Kinerja Tahun 2024 dan penetapan kinerja untuk tahun 2024.
- BAB III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja dan metode penyimpulan capaian kinerja, serta menjelaskan pula realisasi anggaran.
- BAB IV - Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kota Pekanbaru tahun 2024 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis RENSTRA Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota teilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun yaitu dari tahun 2023 - 2026.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana

Strategis Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah setiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif, maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measurable, relevant, time bond* dan *continuously improve* (SMART-C).

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Tahun 2024 berdasarkan pada Dokumen RENSTRA Sekretariat Daerah 2023 – 2026 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan 2.2.

Tabel 2.1

Tujuan Sekretariat Daerah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah
		Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah
		Nilai LPPD

Tabel 2.2

Sasaran/Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2023 – 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran	Satuan	Baseline (2022)	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				Kondisi Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	Indeks	91,88	88,00	88,20	88,50	90,00	90,00
		Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2.17 (Cukup)	2.7 (Baik)	3 (Baik)	3.3 (Baik)	3.5 (Sangat Baik)	3.5 (Sangat Baik)
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah	Predikat	B	B	B	B	B	B
		Nilai LPPD	Nilai	3,44	3,03	3,07	3,10	3,15	3,15

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah

ditetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan. Setelah dilakukan review oleh INSPEKTORAT Kota Pekanbaru dan BAPPEDA Kota Pekanbaru pada pertengahan Tahun 2022 terhadap sasaran yang ditetapkan di dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 - 2026 terdapat indikator kinerja diseluruh sasaran dan juga penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dana tau sasaran. Hasil revidi selanjutnya menjadi Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru dengan Walikota Pekanbaru untuk Tahun 2024.

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip : menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan

operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah teilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

2.1.3 Program, Kegiatan dan Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu di implementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Untuk tahun 2024 ada 3 Program , 19 Kegiatan dan 73 Sub Kegiatan yang dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 %
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan

9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
11	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 laporan
12	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
13	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan
14	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
15	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 laporan
16	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket
17	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen

18	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang
19	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	7 Orang
20	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 laporan
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket
22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	18 Paket
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	96 Paket
24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50 paket
25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10 Dokumen
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
27	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24 Dokumen

28	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 laporan
29	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit
30	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	985 Unit
31	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	365 Unit
32	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan
33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan
35	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Laporan
36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan
37	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan

38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	177 Unit
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	10 Unit
41	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	433 Unit
42	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	455 Unit
43	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit
44	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 Unit
45	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	46 Unit
46	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 laporan

47	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan
48	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 paket
49	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 orang
50	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan
51	Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	1 laporan
52	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen
53	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan
54	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen
55	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen

56	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen
57	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 laporan
58	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan
59	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan
60	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan
61	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terkoordinir dan terfasilitasi	100%
62	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	1 laporan
63	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen
64	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen
65	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen

66	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1 laporan
67	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen
68	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	14 Dokumen
69	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	6 Dokumen
70	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1 laporan
71	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	600 dokumen
72	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 kasus
73	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	600 dokumen

74	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1 laporan
75	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen
76	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen
78	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan
79	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terkodisir dan terfasilitasi	100%
80	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1 laporan
81	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen
82	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan
83	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen
84	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1 laporan

85	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen
86	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan
87	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan
88	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 laporan
89	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen
90	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen
91	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang
92	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1 laporan
93	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen

94	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen
95	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru (2024)

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, maka diperlukan dana untuk mendukung kegiatan operasional yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kota Pekanbaru. Anggaran Murni untuk Tahun 2024 sebesar 193.861.489.649,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah). Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Anggaran dalam Belanja Tidak Langsung terdiri dari Gaji dan Tunjangan Tahun 2024 dengan besaran anggaran sebesar 23.410.891.537,- (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Selapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).

b. Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung untuk Tahun Anggaran 2024 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal dengan besar anggaran sebesar 170.450.598.112,- (Seratus Tujuh Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Belas Rupiah).

Tabel 2.4
Anggaran Sekretariat Daerah Per-Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 terhadap Rencana (target) RENSTRA

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN TAHUN 2024	RENCANA (TARGET) SAMPAI DENGAN TAHUN 2024
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	153.695.271.747	113.220.802.085
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	211.681.720	678.959.905
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.519.800	243.422.322
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.093.020	232.537.583
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.068.900	203.000.000
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	247.643.100	549.231.217
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	148.927.180	283.478.395
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.653.460	118.667.480

9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	43.062.460	147.085.342
10	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	359.872.260	456.939.740
11	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80.063.160	153.469.870
12	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	184.006.660	200.000.000
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	95.802.440	103.469.870
14	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	221.435.265	766.750.726
15	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	164.125.500	180.538.050
16	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	56.309.765	106.340.520
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	340.946.556
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.000.000	138.925.600

19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.253.601.892	13.678.095.206
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.767.220.100	1.398.942.600
21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	57.750.000
22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.474.273.500	790.222.730
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.532.568.300	6.852.052.150
24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.173.932.612	2.233.952.146
25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	174.669.200	475.175.580
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.023.013.280	1.650.000.000
27	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	107.924.900	220.000.000
28	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.334.341.400	12.724.647.870

29	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	1.100.000.000
30	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	1.100.000.000
31	Pengadaan Mebel	1.610.199.000	2.824.647.870
32	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.724.142.400	7.700.000.000
33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.907.749.588	21.093.742.428
34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	110.000.000
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.999.999.038	9.499.903.600
36	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.481.449.438	2.449.473.268
37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.421.301.112	9.034.365.560
38	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.142.137.725	22.199.939.613

39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	837.480.000	1.778.157.700
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.534.680.000	6.472.504.720
41	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	709.222.800	400.000.000
42	Pemeliharaan Mebel	256.850.000	256.850.000
43	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.141.398.200	1.113.484.790
44	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.750.000	450.000.000
45	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.388.456.725	9.864.801.003
46	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	270.300.000	1.864.141.400
47	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	230.770.300	214.408.700
48	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	168.370.300	177.448.700

49	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	62.400.000	36.960.000
50	Penataan Organisasi	1.425.964.124	1.754.200.191
51	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	575.528.272	827.993.108
52	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	224.619.728	247.246.859
53	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	151.462.836	158.669.230
54	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	94.711.900	105.459.971
55	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	379.641.388	414.831.023
56	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	14.949.182.836	10.239.161.518
57	Fasilitasi Keprotokolan	4.335.477.158	4.335.430.273
58	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	6.265.009.400	3.555.029.197

59	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4.348.696.278	2.348.702.048
60	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	36.700.969.704	18.128.957.256
61	Administrasi Tata Pemerintahan	3.464.658.378	2.317.140.715
62	Penataan Administrasi Pemerintahan	2.153.659.600	955.366.254
63	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	463.638.800	610.345.850
64	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	847.359.978	751.428.611
65	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	26.434.194.448	12.307.576.782
67	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.957.133.580	1.409.704.252
68	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	17.483.993.168	5.360.203.009
69	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	6.993.067.700	5.537.669.521

70	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.906.628.190	2.303.519.795
71	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1.188.686.358	194.780.075
72	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.844.606.818	1.433.381.686
73	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	873.335.014	675.358.034
74	Fasilitasi Kerjasama Daerah	2.895.488.688	1.200.719.964
75	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2.417.129.120	592.336.064
76	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	326.180.768	364.671.000
77	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	152.178.800	243.712.900
78	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.465.248.198	3.055.990.882
79	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	849.770.648	759.578.947

80	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	324.125.640	291.940.870
81	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	375.464.908	220.779.573
82	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	150.180.100	246.858.504
83	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	975.819.412	789.363.309
84	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	268.634.952	257.635.254
85	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	402.289.320	247.291.742
86	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	304.895.140	284.436.313
87	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.101.449.156	911.305.786
88	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	243.729.940	262.007.950
89	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	527.169.468	433.830.793

90	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	330.549.748	215.467.043
91	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	538.208.982	595.742.840
92	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	168.040.076	202.614.280
93	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	170.234.126	189.414.280
94	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	199.934.780	203.714.280
TOTAL KESELURUHAN		170.450.598.112	105.541.025.252

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru (Data diolah)

Tabel 2.5

Alokasi Anggaran Per-Bagian di Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru 2024

No	Nama Bagian	Tahun Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024
1	Bagian Perencanaan dan Keuangan	635.190.420	521.685.800
2	Bagian Umum	107.705.214.418	108.500.196.113
3	Bagian Organisasi	1.425.964.124	1122480767
4	Bagian Prokopim	20.518.011.248	18605713810
5	Bagian Tata Pemerintahan	3.464.658.378	2.305.274.506
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	26.434.194.448	24.031.585.694
7	Bagian Hukum	3.906.628.190	2.556.829.875
8	Bagian Kerjasama	2.895.488.688	2.441.372.544
9	Bagian Perekonomian	849.770.648	505.904.482
10	Bagian Administrasi Pembangunan	975.819.412	397.329.292
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.101.449.156	869.256.593
12	Bagian SDA	538.208.982	182.439.602
JUMLAH		170.450.598.112	161.954.015.358

Sumber : BPKAD Kota Pekanbaru (data diolah)

2.2 Rencana Kerja

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan beedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, RENJA Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RPD, dan RENSTRA Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu RENJA Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis tiga tahunan yang dituangkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat Eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran LKjIP Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	88,20	93.70	104,32
		Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3 (Baik)	3,42 (Baik)	126,66
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah	B	BB	115
		Nilai LPPD	3,07	2,61	86,13

Tabel 2.6
Program Pada Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM	APBD 2024	APBD-P 2024	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	153.695.271.747	166.898.722.500	11 Keg
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	36.700.969.704	38.468.751.818	4 Keg
3.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	3.465.248.198	3.335.487.234	4 Keg
TOTAL		193.861.489.649	208.702.961.552	19 Keg

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban perorangan atau Badan Hukum atau pimpinan kolektif untuk menjawab secara transparan terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak pemberi amanah.

Jawaban secara transparan tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan amanat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program serta sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi RPD Kota Pekanbaru 2023-2026.

Untuk mewujudkan pencapaian Pekanbaru sebagai *Smart City* yang madani pada Tahun Pertama RPD Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru memfokuskan pada peningkatan pembangunan manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di semua sektor. Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 pelaksanaan RPD Kota Pekanbaru adalah melanjutkan arah kebijakan pembangunan tahun sebelumnya dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap capaian sasaran dan indikator kinerja daerah sebagaimana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun kelima ini akan diarahkan untuk peningkatan pembangunan manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di semua sektor.

3.1 **Pengukuran Capaian Kinerja**

3.1.1 **Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran srategis yang ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi instansi pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru tahun 2023 - 2026

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masing-masing indikator kinerja sasaran yang akan dicapai.

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024
berdasarkan RENSTRA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	88,20	93,70	104,32
		Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3 (Baik)	3,85 (Sangat Baik)	128,33
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah	B	BB	103
		Nilai LPPD	3,07	N/A	N/A
RATA-RATA CAPAIAN					83,91

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai persentase rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2024 adalah sebesar **83,91%** (Memuaskan). Dari 4 (Empat) indikator kinerja terdapat 3 (Tiga) indikator kinerja yang memiliki capaian 100% atau lebih, 1 (Satu) indikator kinerja lainnya N/A.

3.1.2 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Penjelasan mengenai capaian masing-masing indikator sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mengukur sasaran ini, maka ditetapkan 2 (Dua) indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah

Pada Tabel 3.2 dibawah ini dapat dilihat rekapitulasi indeks kepuasan masyarakat terhadap organisasi perangkat daerah di Kota Pekanbaru. Dari seluruh perangkat daerah dapat dilihat nilai indeks tertinggi adalah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Skor Kepuasan Masyarakat 98,70 dengan nilai Mutu A. Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan skor kepuasan masyarakat 97,12 dengan nilai mutu A. selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan skor kepuasan masyarakat 96,48 dan nilai mutu A. selanjutnya Badan Pendapatan Daerah dengan skor kepuasan masyarakat 96,02 dan nilai mutu A. selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan dengan skor kepuasan masyarakat 95,87 dan nilai mutu A. selanjutnya Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan dengan skor kepuasan masyarakat 95,09 dan nilai mutu A. selanjutnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan skor kepuasan masyarakat 94,04 dan nilai mutu A. selanjutnya Sekretariat Daerah dengan skor kepuasan masyarakat 93,70 dan nilai mutu A. selanjutnya Kecamatan Marpoyan Damai dengan skor kepuasan masyarakat 93,17 dan nilai mutu A. selanjutnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan skor kepuasan masyarakat 92,73 dan nilai mutu A. selanjutnya Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia dengan skor kepuasan masyarakat 92,62 dan nilai mutu A. selanjutnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan skor kepuasan masyarakat 92,62 dan nilai mutu A. selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan skor kepuasan masyarakat 92,18 dan nilai mutu A. selanjutnya Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru dengan skor kepuasan masyarakat 92,07 dan nilai mutu A. selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja dengan skor kepuasan masyarakat 92,07 dan nilai mutu A. selanjutnya Dinas Pertanahan dengan skor kepuasan masyarakat 91,93 dan nilai mutu A. selanjutnya Dinas Perhubungan dengan skor kepuasan masyarakat 91,32 dan nilai mutu A. selanjutnya Badan Penelitian dan Pengembangan dengan skor kepuasan masyarakat 90,97 dan nilai mutu A. selanjutnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan skor kepuasan masyarakat 90,65 dan nilai mutu A. selanjutnya Dinas Tenaga Kerja dengan skor kepuasan masyarakat 90,19 dan nilai mutu A. selanjutnya Dinas Pertanian dan Perikanan dengan skor kepuasan masyarakat 90,18 dan nilai mutu A. selanjutnya Dinas Pendidikan dengan skor kepuasan masyarakat 90,14 dan nilai mutu A. selanjutnya Kecamatan Payung Sekaki dengan skor kepuasan masyarakat 89,30 dan nilai mutu A. selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan skor kepuasan masyarakat 88,98 dan nilai mutu A. selanjutnya Kecamatan Sukajadi dengan skor kepuasan masyarakat 88,91 dan nilai mutu A. selanjutnya Kecamatan Tuah Madani dengan skor kepuasan masyarakat 88,40 dan nilai mutu A. Kedua puluh enam dinas tersebut memiliki nilai mutu A sedangkan organisasi perangkat daerah lainnya dengan nilai mutu B.

Tabel 3.2 Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	IKM 2024	MUTU 2024
1.	Sekretariat Daerah	93,70	A
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98,70	A
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	97,12	A
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	96,48	A

5.	Badan Pendapatan Daerah	96,02	A
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan	95,87	A
7.	Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	95,09	A
8.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	94,04	A
9.	Kecamatan Marpoyan Damai	93,17	A
10.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	92,73	A
11.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	92,62	A
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	92,62	A
13.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	92,18	A
14.	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	92,07	A
15.	Satuan Polisi Pamong Praja	92,07	A
16.	Dinas Pertanahan	91,93	A
17.	Dinas Perhubungan	91,32	A
18.	Badan Penelitian dan Pengembangan	90,97	A
19.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	90,65	A
20.	Dinas Tenaga Kerja	90,19	A
21.	Dinas Pertanian dan Perikanan	90,18	A
22.	Dinas Pendidikan	90,14	A
23.	Kecamatan Payung Sekaki	89,30	A
24.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	88,98	A
25.	Kecamatan Sukajadi	88,91	A
26.	Kecamatan Tuah Madani	88,40	A
27.	Kecamatan Bukit Raya	87,54	B
28.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	87,19	B
29.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	87,00	B

30.	Kecamatan Kulim	86,67	B
31.	Kecamatan Senapelan	86,57	B
32.	Kecamatan Limapuluh	85,89	B
33.	Dinas Kesehatan	85,84	B
34.	Kecamatan Bina widya	85,74	B
35.	Kecamatan Pekanbaru Kota	85,67	B
36.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85,58	B
37.	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	85,43	B
38.	Dinas Ketahanan Pangan	84,54	B
39.	Kecamatan Rumbai	84,32	B
40.	Kecamatan Rumbai Barat	84,32	B
41.	Kecamatan Sail	84,25	B
42.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	83,67	B
43.	Kecamatan Rumbai Timur	82,95	B
44.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	81,97	B
45.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	81,30	B
46.	Kecamatan Tenayan Raya	81,29	B
47.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	79,61	B
48.	Dinas Sosial	79,32	B
	Rata – rata	90,14	A

Sumber : Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan Nilai SKM dan Mutu Pelayanan Menurut Dinas, Badan dan Kecamatan di Kota Pekanbaru Berdasarkan tabel diatas maka nilai rata-rata pelayanan 48 OPD di Kota Pekanbaru adalah 90,14 atau dengan kategori Mutu pelayanan A atau dengan kesimpulan mutu pelayanan (semakin membaik) di Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dari hasil survey pendapat responden, unsur penilaian paling rendah terdapat pada unsur

Perilaku Pelaksana. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya *perilaku pelaksana* petugas maupun Pejabat terkait menyebabkan penyelesaian menjadi lebih lambat.

Pada Tabel 3.3 berikut ini bisa dilihat bagaimana tanggapan responden tentang kualitas pelayanan yang diberikan di Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dengan tanggapan bagaimana pemahaman masyarakat tentang kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

Tabel 3.3 Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA PER UNSUR	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
U1	Persyaratan Pelayanan	3.70	92.41	A	Sangat Baik
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.71	92.86	A	Sangat Baik
U3	Waktu Penyelesaian	3.75	93.75	A	Sangat Baik
U4	Biaya / Tarif	3.91	97.77	A	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.68	91.96	A	Sangat Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	3.71	92.86	A	Sangat Baik
U7	Perilaku Pelaksana	3.71	92.86	A	Sangat Baik
U8	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3.73	93.30	A	Sangat Baik
U9	Sarana dan Prasarana	3.82	95.54	A	Sangat Baik
IKM		3.75	93.70	A	Sangat Baik

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru (2024)

Berdasarkan Tabel 3.3 unsur yang memiliki nilai tertinggi adalah unsur 4 yaitu unsur Biaya / Tarif. Unsur 4 tersebut memiliki nilai 3,91 dengan nilai mutu A dan kinerja pelayanan sangat baik. Selain itu semua unsur memiliki mutu pelayanan A sehingga dapat diartikan kinerja pelayanan untuk semua unsur berada pada kategori sangat baik.

Peningkatan pelayanan pada Sekerariat Daerah Kota Pekanbaru terus dilakukan, penyediaan sarana dan prasarana perkantoran disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Upaya ini telah membawa tingkat kepuasan penerima layanan pada taraf yang

lebih baik. Dalam tahun kedua indek kepuasan pada pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru sangat baik. Dan pada tahun 2024 ini nilai indek menunjukkan arah kepuasan yang sangat baik dari penerima layanan.

b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah

Berdasarkan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKjIP, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi tentang implementasi SAKIP, dimana berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024 menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru memiliki nilai atau **Skor 72,10%** atau **Nilai BB**.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (Empat) komponen besar manajemen kinerja, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Tabel 3.4 Hasil Capaian Penilaian SAKIP Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru

N o	Komponen	Bobot	Capaian SAKIP 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,52
2.	Pengukuran Kinerja	30	25,25
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,83
Total Nilai		100	72,10
Hasil Penilaian			BB

Sumber : Inspektorat Kota Pekanbaru (2024)

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut untuk dapat mencapai target penilaian SAKIP Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dengan hasil penilaian BB, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian khusus untuk dibenahi/disempurnakan yang menjadi rekomendasi dari INSPEKTORAT Kota Pekanbaru, diantaranya :

1. Perencanaan Kinerja, agar :

- a) Menyusun matrik peran hasil dari jabatan pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan fungsional umum
- 2. Pengukuran Kinerja, agar :
 - a) Menyusun Sk kepala opd tentang pemberian reward dan punishment berdasarkan kinerja; hasil evaluasi kinerja 3 bulanan; dan membuat dokumentasi/dokumen pemberian reward dan punishment berdasarkan kinerja.
 - b) Sekretaris Daerah untuk memerintahkan kepada pns Sekretaris Daerah yang belum menginputkan SKP pada halaman website www.Ekinerja.go.id agar segera menginput SKP sebelum 31 Desember 2024.
- 3. Pelaporan Kinerja, agar :
 - a) Menyusun laporan kinerja secara periodik baik triwulan maupun semesteran
 - b) Membuat analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, agar :
 - a) Sekretariat Daerah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Internal dilaksanakan secara berjenjang.

c. Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 69 sampai pasal 74 menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya dinyatakan bahwa apabila kepala daerah tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri Dalam Negeri dan apabila sanksi

yang sudah disampaikan 2 kali berturut-turut tidak ditanggapi maka kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Dikarenakan belum diperoleh surat Keputusan Menteri Dalam Negeri-nya tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional untuk Tahun 2023, maka hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk Tahun 2023 belum ada.

d. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, dimana berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024 menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru memiliki nilai atau Skor **3,85** atau Nilai **Sangat Baik**.

Berdasarkan Domain layanan SPBE yang terdapat pada bagian barang dan jasa sekretariat daerah kota pekanbaru didapatkan hasil dengan kriteria sebagai berikut :

1. Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengadaan barang dan jasa seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
2. Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengadaan barang dan jasa seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
3. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik

lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

4. Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil revidi dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah.

3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 Menurut Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	88,20	93.70	104,32
		Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3 (Baik)	3,85 (Sangat Baik)	128,33
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah	B	BB	103
		Nilai LPPD	3,07	N/A	N/A
RATA-RATA CAPAIAN			83,91		

Tabel 3.5 menyajikan perbandingan capaian kinerja tahun 2024 terhadap capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat rata-rata capaian kinerja kegiatan tahun 2024 senilai **83,91** (Memuaskan).

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru

Tabel 3.6 Capaian RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RENSTRA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA 2026	Realisasi Tahun 2024	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	90,00	93.70	104,11
		Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.5(Sangat Baik)	3,85 (Sangat Baik)	110
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah	B	BB	103
		Nilai LPPD	3,15	N/A	N/A
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2024 TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH (AKHIR RENSTRA 2026)					79,27

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru

Tabel 3.6 menyajikan perbandingan kinerja antara realisasi capaian kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah atau akhir periode RENSTRA yakni tahun 2026. Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja tahun 2024 terhadap target jangka menengah atau akhir periode RENSTRA adalah **79,27%**. Berdasarkan hasil tersebut dapat dirumuskan rencana aksi agar target akhir periode RENSTRA bisa tercapai dengan minimal rata-rata capaian 100% pada tahun 2026 nanti. Adapun hal-hal teknis yang akan dilakukan pada Rencana Aksi akan disampaikan pada Rencana Aksi terhadap Laporan Hasil Evaluasi terhadap Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah periode ini.

3.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat peningkatan kinerja. Hal ini disebabkan integritas dan komitmen Pimpinan melakukan pembenahan/perbaikan didalam menunjang kinerja dan di Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

Sedangkan hambatan/kendala/permasalahan yang dihadapi cenderung disebabkan oleh rasionalisasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

Adapun strategi yang diharapkan pada masa yang akan datang, diantaranya :

- a. Meningkatkan kinerja pada masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dengan memvalidasi kesesuaian setiap Program Kegiatan terhadap dokumen RENSTRA, RENJA, RKT maupun RPD sebelum dituangkan menjadi Program Kegiatan yang akan dilaksanakan dan ditetapkan pada Perjanjian Kinerja masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

- b. Meminimalisir/merampingkan Program Kegiatan dengan tidak mengurangi esensi tugas dan fungsi dari masing-masing Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru sehingga setiap capaian/target yang akan diraih lebih tepat guna dan lebih terukur dengan baik dan dengan nilai yang sangat baik.

3.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program yang menunjang keberhasilan yang tertuang dalam Perjanjian

Kinerja yang dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Tidak ada program/kegiatan yang tidak mendukung capaian indikator kinerja sasaran.

3.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Pertama : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu (.)	Realisasi (.)	%
Meningkatnya Kualitas Pelayan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	Indeks	88,20	93,70	106,23	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.519.800	53.487.400	78,06
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.371.020	46.129.020	86,43
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.412.900	39.924.700	74,75
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.957.298.080	22.732.051.407	91,08
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	148.927.180	127.036.180	85,30
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.653.460	37.511.700	67,40
						Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	43.062.460	31.170.700	72,38

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	Indeks	88,20	93,70	106,23	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	116.521.460	35.475.740	30,45
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	181.206.660	0	0,00
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	95.802.440	64.896.640	67,74
						Pengadaan Mebel	1.903.699.000	1.845.019.200	96,92
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.457.987.000	8.907.557.378	105,32
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	0	0,00
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.999.999.038	9.698.147.639	74,60
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.489.449.438	18.978.593.840	102,65
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.621.901.112	9.170.615.200	72,66

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	Indeks	88,20	93,70	106,23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.337.480.000	2.083.327.191	89,13
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.534.080.000	5.077.769.030	91,75
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	708.358.100	678.582.170	95,80
						Pemeliharaan Mebel	256.850.000	246.950.000	96,15
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.141.398.200	974.097.200	85,34
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.750.000		0,00
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.664.304.618	9.397.709.800	80,57
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	270.300.000	263.388.000	97,44
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	194.557.803	0	0,00
						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	405.976.400	403.013.200	99,27
						Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	62.400.000	0	0,00

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	Indeks	88,20	93,70	106,23	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.146.194.730	1.140.000.000	99,46
						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	399.722.872	263.525.029	65,93
						Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	332.410.052	271.133.731	81,57
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	172.374.600	112.902.400	65,50
						Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	103.190.204	102.257.053	99,10
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	424.423.252	372.662.554	87,80
						Fasilitasi Keprotokolan	5.778.046.536	5.306.820.235	91,84
						Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4.199.409.400	3.975.592.682	94,67
						Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3.943.118.528	3.609.013.683	91,53
						Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3 (Baik)	3,85 (Sangat Baik)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3 (Baik)	3,85 (Sangat Baik)	128,33	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	56.309.765	51.889.765	92,15
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	#DIV/0!
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.000.000	0	0,00
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.067.202.000	7.267.421.700	90,09
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	#DIV/0!
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.674.273.500	1.737.562.065	103,78
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.532.568.300	30.620.536.702	100,29
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.767.521.380	5.147.327.010	89,25
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	174.669.200	101.404.000	58,05
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.022.978.912	1.309.322.633	127,99
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	107.917.600	90.302.600	83,68
					117,28	TOTAL	166.898.722.500	152.536.074.177	91,39
TINGKAT EFISIENSI :									
TINGKAT EFEKTIVITAS :									

Tabel 3.8 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Kedua : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah

Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	(%)	Kegiatan	Pagu (.)	Realisasi (.)	%
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah	Predikat	B	BB	103	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	805.691.880	693.840.580	86,12
						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	17.108.117.728	13.941.169.458	81,49
						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	9.857.967.700	9.396.575.656	95,32
						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1.188.605.508	825.639.031	69,46
						Fasilitasi Bantuan Hukum	1.677.534.818	1.029.129.514	61,35

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah	Predikat	B	B	103	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	873.259.078	702.061.330	80,40
						Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2.394.585.120	2.196.887.570	91,74
						Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	269.422.768	176.974.705	65,69
						Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	137.178.800	67.510.269	49,21
						Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	316.535.184	139.174.348	43,97
						Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	368.398.836	273.320.378	74,19
						Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	119.793.564	93.409.756	77,98

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah	Predikat	B	B	103	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	255.202.352	101.323.752	39,70
						Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	382.174.520	145.274.400	38,01
						Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	289.650.640	150.731.140	52,04
						Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	243.729.940	134.504.311	55,19
						Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	527.169.468	476.379.262	90,37
						Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	330.549.748	258.373.020	78,16
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	141.150.076	65.431.256	46,36

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah	Predikat	B	B	103	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	170.234.126	51.901.246	30,49	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	190.898.780	65.107.100	34,11	
	Nilai LPPD	Nilai	3,07	N/A	N/A	Penataan Administrasi Pemerintahan	2.417.932.870	1.207.133.561	49,92	
						Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	463.638.800	182.925.496	39,45	
						Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.274.816.748	915.215.449	71,79	
	RATA-RATA CAPAIAN					51,5	TOTAL	41.804.239.052	33.289.992.588	79,63
	TINGKAT EFISIENSI :									
TINGKAT EFEKTIVITAS :										

3.7 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024, alokasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru adalah sebesar 208.702.961.552,- (Dua Ratus Delapan Milyar Tujuh ratus Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua), dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 Rincian Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru TA. 2024 berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Alokasi	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Langsung			
	a. Gaji dan Tunjangan	9.995.717.718	9.944.499.356	90,93%
	b. Tambahan Penghasilan PNS	14.961.580.362	13.927.552.051	84,93%
2.	Belanja Langsung	183.745.663.472	161.954.015.358	131,72%
	J u m l a h	208.702.961.552	185.826.066.765	124,09%

Sumber : BPKAD Kota Pekanbaru (Data Diolah)

Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah dikelola langsung oleh Bendahara Sekretariat Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah di Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Sedangkan Anggaran Belanja Langsung, merupakan anggaran pembiayaan program dan kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dan dikelola oleh 12 Bagian pada Sekretariat Daerah dengan rincian alokasi anggaran per-Bagian adalah sebagaimana tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10 Alokasi Anggaran Belanja Langsung per-Bagian
Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024

No	Nama Bagian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	635.270.720	435.632.080	68,57
2.	Bagian Umum	119.553.434.976	108.500.196.113	90,75
3.	Bagian Organisasi	1.432.120.980	1.122.480.767	78,38
4.	Bagian Prokopim	20.320.597.744	18.605.713.810	91,56
5.	Bagian Tata Pemerintahan	4.156.388.418	2.305.274.506	55,46
6.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	27.771.777.308	24.031.585.694	86,53
7.	Bagian Hukum	3.739.399.404	2.556.829.875	68,38
8.	Bagian Kerjasama	2.801.186.688	2.441.372.544	87,15
9.	Bagian Perekonomian	804.727.584	505.904.482	62,87
10.	Bagian Administrasi Pembangunan	927.027.512	397.329.292	42,86
11.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.101.449.156	869.256.593	78,92
12.	Bagian SDA	502.282.982	182.439.602	36,32
JUMLAH		183.745.663.472	161.954.015.358	88,78

Sumber : BPKAD Kota Pekanbaru (Data Diolah)

Realisasi anggaran belanja langsung yang dikelola oleh seluruh Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2024 dari total anggaran sebesar **183.745.663.472,-** terealisasi sebesar **161.954.015.358,-** atau sebesar **88,78%**.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru telah menyusun LKjIP tahun 2024 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dipercayai pada Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah di perjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LKjIP 2024 ini merupakan laporan tahun pertama RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru tahun 2023 - 2026.

Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru telah berusaha untuk meraih tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut secara optimal meskipun dalam perjalanannya ditemui beberapa kendala atau permasalahan. Namun demikian, segenap elemen unit organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru tetap berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan berbagai strategis pemecahan permasalahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2024.

Dari 2 sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2024, belum semua sasaran yang yang ditetapkan memperoleh kategori BERHASIL.

Selanjutnya bila dilihat dari akuntabilitas kinerja keuangan untuk tahun 2024, realisasi total belanja langsung dari dana APBD Kota Pekanbaru pada Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru adalah sebesar 183.745.663.472,-. Dari target total belanja yang ditetapkan sebesar 161.954.015.358,-.

Demikian hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan dan pertimbangan pengambilan kebijakan yang akan datang.

Akhirnya, semoga LKjIP ini menjadi pendorong dan pemicu bagi segenap anggota organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru pada masa mendatang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.